

at-turās

Jurnal Studi Keislaman

Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam
Subhan

Nafkah Isteri Ter-*Thalaq Ba'in*:
Kajian Sejarah Sosial Pemikiran Imam Ahmad ibn Hambal
Fuad Rahman

Diskursus Hukum Kewarisan '*An-Tarâdhin*:
Menjembatani Dialektika Kewarisan Maternalistik dan Paternalistik
di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
Albert Al-Fikri

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PROBOLINGGO – JAWA TIMUR**

at-turās	vol. IV	hlm. 1- 152	no. 1	Probolinggo, Januari – Juni 2017	p-ISSN: 2355-567X e-ISSN: 2460-1063
----------	---------	-------------	-------	-------------------------------------	--

at-turās

Jurnal Studi Keislaman

Editorial Team

Editor in Chief

Achmad Fawaid, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Ahmad Sahidah, Universitas Utara Malaysia, Malaysia
Saifuddin Zuhri Qudsy, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
Subhan, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi, Indonesia
Hasan Baharun, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Sugiono, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Akmal Mundiari, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Muhammad Al-Fayyadl, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Managing Editor

Nurul Huda, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Mushafi Miftah, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Assistant

Muzammil, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

at-turās, published by Institute for Publication, Research, and Social Empowerment (LP3M), IAI Nurul Jadid Probolinggo since 2014. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of Islamic studies, including law, philosophy, mysticism, history, art, theology, and many more. This journal, serving as a forum for the study of Islam in Indonesia and other parts of the world within its local and challenging global context, invites Indonesian and non-Indonesian scholars to focus studies of particular theme and interdisciplinary studies.

Mailing address:

at-turās | LP3M IAI Nurul Jadid, PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291
telp./faks. (0335) 771732; email: jurnal.atturas@yahoo.com;
website: <http://jurnal.iainuruljadid.ac.id/index.php/atturas>

at-turās

Jurnal Studi Keislaman

Table of Contents

- 1 *Subhan*
**NALAR KESETARAAN MAHAR DALAM
PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM**
- 17 *Fuad Rahman*
**NAFKAH ISTERI TER-*THALÂQ BA'ÎN*: KAJIAN SEJARAH SOSIAL
PEMIKIRAN IMAM AHMAD IBN HAMBAL**
- 33 *Albert Al-Fikri*
**DISKURSUS HUKUM KEWARISAN '*AN-TARÂDHIN*:
MENJEMBATANI DIALEKTIKA KEWARISAN MATERNALISTIK
DAN PATERNALISTIK DI KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI**
- 55 *Refky Fielnanda*
**PERCAMPURAN DEPOSITO DAN INVESTASI
DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM**
- 69 *Alvan Fathoni*
**PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM**
- 85 *Bakir*
**PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM
PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA**

- 97 *Musolli*
**AHLUL BAYT PERPEKTIF SYIAH DAN SUNNI:
STUDI TAFSIR *AL-MÎZAN* DAN TAFSIR *TAHRÎR WA AL-TANWÎR***
- 109 *Idrus*
FIQH DAN DINAMIKA SOSIAL
- 123 *Mursyid*
**PLURALITAS AGAMA DAN FAHAM KEAGAMAAN:
PELAJARAN DARI PONDOK PESANTREN NURUL JADID**
- 141 *Faiẓin*
HUKUM DAN KEKUASAAN: SUATU PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

Mursyid

PLURALITAS AGAMA DAN FAHAM KEAGAMAAN: PELAJARAN DARI PONDOK PESANTREN NURUL JADID

Institut Agama Islam Nurul Jadid Probolinggo
email: mursyid.63@gmail.com

Abstrak: *Tulisan ini berusaha menelaah secara sosiologis kondisi pluralitas agama dan paham keagamaan serta penerapannya dalam sistem kepemimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Selain itu, tulisan ini juga ingin menunjukkan bagaimana kekuatan budaya dan proses negosiasi kultural yang diterapkan oleh pemimpin pondok pesantren untuk membentuk pendidikan plural yang sesuai bagi para santri di dalamnya. Untuk menganalisis hal itu semua, terlebih dahulu perlu dideskripsikan pola kecenderungan umum umat Islam melihat perbedaan agama dan paham keagamaan di dalam Islam. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pesantren Nurul Jadid adalah dengan menguatkan akar budaya pesantren yang sudah ada dengan tindakan-tindakan sosial yang ditauladani dari kiai. Hal ini karena kiai dan tradisi pesantren merupakan dua ornamen yang sangat mempengaruhi santri.*

Katakunci: *pluralitas agama, paham keagamaan, Pesantren Nurul Jadid*

Abstract: *This article attempts to provide a sociological perspective on the religious pluralism and ideology, and its implementation in the leadership system of Nurul Jadid Islamic Boarding School at Probolinggo, East Java. Additionally, it also aims to argue the ways cultural power and negotiation are implemented by leaders of pesantren in building plural education for santri. To deeply analyze it, it is important first to describe the common pattern of Muslim in perceiving the diversity of religions and religious ideologies in Islam. One of the ways Nurul Jadid has carried out is to strengthen cultural roots of pesantren and to adapt it with social actions under kiai's modelling figure, since the kiai and pesantren tradition are two ornaments contributing on the formation of santri's behaviors.*

Keywords: *religious plurality, religious ideologies, Pesantren Nurul Jadid*

Pendahuluan

Heterogenitas masyarakat, baik agama, paham keagamaan, suku dan ras dengan berbagai dimensi kepentingan sosial-kemasyarakatan, tatanan ekonomi, struktur kekuasaan dan ideologi sosial-politik yang cenderung hegemonik, seringkali menjadi persoalan yang cukup kompleks dan problematis.¹ Bahkan pada perkembangannya, fenomena agama yang memiliki tingkat heterogenitas dan pluralitas yang tinggi, amat potensial memunculkan konflik.²

Sejarah menyebutkan, lahirnya konflik bernuansa agama selain dipicu oleh perbedaan keyakinan dan keragaman pemahaman terhadap doktrin-normatif (kitab suci khususnya),³ juga dipicu oleh posisi agama yang dikaitkan dengan kepentingan ekonomi dan politik para pemeluknya, sehingga tidak saja melahirkan konflik intern di dalam suatu kelompok keagamaan,⁴ bahkan memunculkan konflik lintas agama⁵

Konflik antar pemeluk agama atau paham keagamaan bisa terjadi, ketika kelompok yang satu, merasa tidak nyaman berada atau berdampingan dengan kelompok keyakinan atau kepercayaan yang berbeda. Kehadiran kelompok keyakinan atau paham keagamaan yang berbeda dianggap mengganggu keberadaan keyakinan atau paham keagamaan yang telah

1 Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1998), 337.

2 Syafa'atun Elmirzana, "Pluralisme, Konflik dan Dialog (Analisa dan Refleksi)", *Esensia*, 2. (Januari, 2001), 41.

3 Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997), 6. Lihat juga dalam Komarudin Hidayat "Agama-agama Besar Dunia: Masalah Perkembangan dan Interelasi" dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (editor), *Passing Over Melintasi Batas Agama*, (Jakarta: Gramedia, 1999), 209.

4 Syafa'atun Elmirzana, "Pluralisme, 41.

5 Asghar Ali Engineer, "On Religious and Intercultural Dialogue," dalam <http://www.global.net.com>. lihat pula Hasan Hanafi, *Islam in The Modern World: Tradition, Revolution and Culture Vol.II* (Kairo: Dar Keba Bookshop, 2000), 557-559.

diyakini kebenarannya secara eksklusif. Konflik-konflik tersebut, walaupun dipicu oleh berbagai kepentingan praktis, namun sumber yang sesungguhnya tidak lepas dari hegemoni nilai dan klaim kebenaran sepihak dari masing-masing kelompok keyakinan atau paham keagamaan.⁶

Agama, walaupun secara normatif, selalu mengajarkan perdamaian dan kerukunan, namun dalam fakta sosial dapat dengan mudah dilihat, isu agama atau paham keagamaan seringkali diikuti bahkan mejadi salah satu pemicu dari berbagai aksi kekerasan dan kerusuhan. Agama yang telah mengambil tempat dalam pelataran budaya, walaupun bagi setiap pemeluknya diyakini sebagai wahyu atau petunjuk Tuhan, namun dalam praktik keberagamaan akan senantiasa terkait dengan budaya pemeluknya. Agama dalam konteks budaya, selalu memunculkan wajah ganda, pada satu sisi bisa berfungsi sebagai kekuatan integratif, namun pada sisi yang lain dapat pula menjadi kekuatan disintegratif. Agama, bisa menjadi kekuatan dalam menciptakan ikatan dan kohesi kelompok masyarakat, dan pada saat yang sama menjadi sumber pemisahan dari kelompok lain.⁷

Konflik sosial, dengan mengatasnamakan atau membawa masalah agama, dapat disaksikan dari berbagai tindak kekerasan yang terjadi di Indonesia pada akhir abad ke 20 dan awal abad ke 21. Antara lain, kerusuhan di Situbondo pada tahun 1996, pada tahun yang sama terjadi kerusuhan serupa di Tasikmalaya, kemudian disusul tahun 1997 terjadi konflik serupa di Rengasdengklok, tahun 1998 pecah insiden Ketapang yang berlanjut pada tragedi Ketapang. Pada tahun yang sama pecah insiden Ambon, kemudian berlanjut pada pertikaian antar agama di Halmahera dan Poso, dan pada tahun 2000 terjadi pengeboman terhadap rumah-rumah ibadah di Medan.⁸

Pada awal abad ke 21 ini, sejumlah kejadian tindak kekerasan yang terkait dengan paham keagamaan muncul di berbagai daerah, seperti penyerangan FPI terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Tugu Monas Jakarta pada 1 Juni 2008, pada saat AKKBB memperjuangkan hak keberadaan Ahmadiyah yang dipaksa untuk segera dibubarkan, karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam⁹. Kemudian penyerangan sekelompok umat Islam terhadap jama'ah Ahmadiyah di Banten pada 6 Pebruari 2011, yang dipicu oleh penilaian sebagian umat Islam bahwa aliran Ahmadiyah adalah aliran sesat.

Pada tanggal 15 Pebruari 2011, terjadi penyerangan terhadap Pondok

6 Andre Ata Ujan dkk, *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*, (Jakarta : PT. Indeks, 2011), 110.

7 Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan* (Jakarta: Prenada, 2011), 3.

8 *Ibid*, 85.

9 Moh. Yamin, Vivi Auliya, *Meretas Pendidikan Toleransi, Plurasisme dan Multikulturalisme Keniscayaan Peradaban*, (Malang : Madani Media, 2011), 2.

Pesantren al-Ma'hadu al-Islamiyah yang dikelola Yayasan Pondok Pesantren Islam (YAPI), Desa Kerep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, yang diduga terkait dengan konflik sunni-syi'ah (Harian Bangsa, 16 Pebruari 2011). Pada penghujung tahun 2011; yaitu tanggal 29 Desember 2011, terjadi pembakaran Pondok Pesantren di Dusun Nagkrenang Desa Karang Gayam Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, yang diduga terkait dengan perbedaan aliran antara kakak-beradik Kyai Rois dan Kyai Tajul Arifin, Kyai Rois mengikuti aliran Sunni dan Kyai Tajul Arifin mengikuti aliran Syi'ah (Metrotvnews.com). Kemudian pada tahun 2013, terjadi kembali penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Banten.

Gambaran Islam Indonesia sebagai Islam toleran, akhirnya menjadi terpatahkan akibat kebangkitan gerakan-gerakan keagamaan yang bercorak fundamentalis. Radikalisasi doktrin Islam yang disertai dengan aksi-aksi kekerasan, sasarannya bukan hanya ditujukan kepada kelompok-kelompok agama yang berbeda, melainkan juga ditujukan kepada berbagai kelompok Muslim sendiri yang berbeda, khususnya terhadap Jamaah Ahmadiyah, Shi'ah, Salafi, dan Jaringan Islam Liberal (JIL)¹⁰

Hasil survei Lembaga Studi *Center of Strategic and International Studies* (CSIS) pada tahun 2012, tentang toleransi agama di Indoonesia, menunjukkan bahwa toleransi beragama orang Indonesia tergolong rendah. Kalaupun masyarakat beragama siap hidup berdampingan dalam kehidupan sosial, namun ketika terkait dengan pembangunan tempat ibadah, ada kecenderungan kelompok mayoritas tidak menyetujui. Dari 2.213 responden di 23 propinsi Indonesia, 59,5 % responden tidak keberatan bertetangga dengan orang yang beda agama, sedangkan 33,7 % memilih menolak tetangga yang beda agama. Kemudian terkait dengan pembangunan tempat ibadah, 68,2 % responden memilih menolak pembangunan tempat ibadah dari agama lain, hanya 22,1 % lainnya mengaku tidak keberatan.¹¹

Dalam penelitian Lucia Ratih Kusumadewi pada tahun 1999 di tiga Perguruan Tinggi di Jakarta (UI, IAIN Syarif Hidayatullah, dan STF Driyarkara), tentang sikap dan toleransi beragama di kalangan mahasiswa, menunjukkan hasil bahwa sikap pluralisme di kalangan mahasiswa lebih dominan (55,8 %), sikap toleransi dikategorikan tinggi (61,7 %). Dalam sikap toleransi, dengan indikator keinginan supaya orang lain memiliki sikap yang sama mencapai 74 %, menyikapi perpindahan agama mencapai 75 %, dan menyikapi kawin beda agama mencapai sikap toleransi yang sangat tinggi 85 %. Hal ini menunjukkan bahwa potensi toleransi di kalangan Mahasiswa

10 M. Dawam Raharjo, Fanatisme dan Toleransi, dalam Irwan Masduki, *Berislam Secara Toleran Teologi Kerukunan Umat Beragama*, (Bandung : Mizan, 2011), xvi-xvii

11 <http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/06/ri-becomes-more-intoleransi-bitml>, (14 Juni 2013)

sangat tinggi.¹²

Kemudian hasil survei yang dilakukan oleh PPIM Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2004, bersama Freedom Institute dan Jaringan Islam Liberal, tentang orientasi sosial politik Islam, menunjukkan bahwa: 18 % dari 1200 responden setuju dengan kegiatan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI), seperti merazia tempat judi, dan kegiatan maksiat atau hiburan malam di Bulan Ramadhan, 15% responden mendukung kegiatan Majelis Mujahidain Indonesia (MMI), 5% mendukung kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam memperjuangkan diterapkannya syariat Islam, 13% setuju dengan Jamaah Islamiyah (JI) dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, yang dianggap menindas umat Islam di berbagai belahan dunia, 16% responden mendukung aksi pengeboman sebagai bentuk pembelaan terhadap Islam.¹³ Walaupun persentase sikap intoleransi dari hasil survei tersebut rendah, namun hasil tersebut menunjukkan bahwa disintegrasi umat beragama dalam pluralitas agama dan paham keagamaan, berpotensi untuk tumbuh di Indonesia.

Penelitian survei yang dilaksanakan oleh Tim LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), pada tahun 2006 di tiga daerah (Bogor, Surakarta dan Cianjur) dengan tema Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Rawan Konflik, ditemukan hasil bahwa sebagian kalangan Muslim Indonesia masih memiliki persoalan dalam konsolidasi demokrasi. Kesediaan Muslim Indonesia untuk hidup sejajar dengan pemeluk agama lain masih rendah, misalnya dalam praktik memberi ucapan selamat, kepada pemeluk agama lain yang sedang merayakan hari besar keagamaannya, hanya 15,6% yang mendukung. Responden yang membolehkan ucapan salam (Assalamu'alaikum) kepada nonmuslim hanya 8%. Untuk praktik silaturahmi dengan nonmuslim di hari besar keagamaan mereka yang menyetujui 38,9%, sedang praktik silaturahmi dengan nonmuslim di luar hari besar keagamaan mereka mencapai 59,9%. Terhadap gagasan, sebaiknya umat Islam hanya berteman dekat dengan orang yang sama-sama memeluk agama Islam saja, memperoleh dukungan 40,4%.¹⁴ Dari hasil penelitian LIPI ini menggambarkan bahwa sikap pluralis komunitas Muslim di Indonesia masih bermasalah.

Penelitian Lembaga Swadaya Masyarakat SETARA Institute, pada tahun 2008 dengan jumlah responden sebanyak 800 orang dari generasi muda yang berumur 17-22 tahun, dengan latar belakang agama yang heterogen,

12 Lucia Ratih Kusumadewi, "Sikap dan Toleransi Beragama di Kalangan Mahasiswa; Studi di Tiga Perguruan Tinggi di Jakarta," *Skripsi*, (Jakarta : FISIP-UI, 1999), 65-78.

13 Saeful Mujani, *Umat Islam Indonesia Dukung Radikalisme*, (Jakarta : Harian Tempo, 12 November 2004)

14 Muhammad Hisyam Ed. *Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Rawan Konflik*, (Jakarta : LIPI, 2006)

hasil survei menunjukkan : 87,1% responden, menyatakan bahwa perbedaan agama tidak menjadi halangan dalam berteman, 67,4% responden menerima fakta perpindahan agama.¹⁵

Pada dasarnya, pluralitas bangsa Indonesia yang ditandai dengan keberagaman etnis, suku, bahasa, dan agama, merupakan *social capital* (modal sosial) yang sangat berharga. Pluralitas bangsa ini apabila dimanfaatkan dengan baik, akan memberi keuntungan besar bagi kejayaan bangsa, tapi apabila pluralitas bangsa ini tidak dikelola secara benar, kondisi ini rentan terjadi konflik. Tindak kekerasan dalam konflik sosial yang sering terjadi antar kelompok masyarakat, bahkan kelompok keagamaan, merupakan bagian dari akibat pluralitas yang tidak dikelola secara benar.¹⁶

Cornelis Lay, memetakan kekerasan atas nama agama menjadi beberapa varian, yaitu:

Pertama, kekerasan yang berlangsung dalam ranah agama yang sama. Dari sudut aktor yang terlibat, terdapat variasi-variasi, antara lain:(a) kekerasan yang melibatkan Ormas dalam komunitas agama yang sama. (b) kekerasan yang melibatkan negara yang bertindak atas nama agama resmi dalam merepresi "aliran sesat" dalam satu agama. (c) kekerasan yang melibatkan komunitas dari agama yang sama. (d) kekerasan yang melibatkan institusi pemegang otoritas agama atas warga dari komunitas agama yang sama.

Kedua, kekerasan yang melibatkan agama yang berbeda. Dari sudut aktor, terdapat variasi pola pula. (a) kekerasan yang melibatkan Ormas satu agama atas komunitas dari agama lain. (b) kekerasan yang melibatkan Ormas dari komunitas agama yang berbeda. Khusus yang satu ini, lebih menampakkan diri dalam raut kekerasan verbal atau simbolik. (c) kekerasan atas kelompok agama yang melibatkan negara melalui pengaturan tertentu.

Ketiga, kekerasan satu kelompok agama atas kelompok lain yang melakukan aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama. Variasi pola juga ditemukan di sini antara lain berupa: (a) kekerasan dilakukan oleh Ormas agama atas aktivitas-aktivitas yang dianggap sebagai simbol kemaksiatan, dan sejenisnya. (b) kekerasan atas nama agama oleh kelompok masyarakat yang ditujukan pada aktivitas-aktivitas yang didakwa sebagai simbol kemaksiatan, dan sejenisnya.¹⁷

15 Tim Penyusun, *Toleransi dalam Pasungan : Pandangan Generasi Muda terhadap Masalah Kebangsaan, Pluralitas dan Kepemimpinan Nasional*, (Jakarta : SETARA Institute, 2008)

16 Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam Indonesia*, (Malang : Aditya Media Publishing, 2011), 14.

17 Cornelis Lay, *Kekerasan Atas Nama Agama, Perspektif Politik*, dalam *Jurnal Ilmu*

Fakta Pluralitas dalam Perspektif Pendidikan

Konstalasi kekerasan atas nama agama yang semakin meningkat di bumi Nusantara, memunculkan kegelisahan akademik tentang efektivitas pendidikan agama dalam melakukan transformasi nilai-nilai manusiawi kepada peserta didik, khususnya dalam pengembangan nilai toleransi yang menjadi bagian dari ajaran agama, dan telah diwariskan para pemimpin Islam terdahulu, dalam membangun relasi agama-agama. Dalam konteks Indonesia, diakui atau tidak, keberhasilan Walisongo dan para penerusnya, dalam menyebarkan dan mengembangkan Islam secara damai di bumi Indonesia, merupakan cerminan dari sinergitas Islam dengan budaya lokal Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.

Masih sering menjadi perdebatan dalam dunia pendidikan, tentang keharusan pendidikan untuk menjadikan peserta didik mampu beradaptasi dengan makna nilai yang telah didapat, atau hanya mengajarkan tentang nilai tanpa tindak lanjut. Karena pendidikan yang mengarahkan peserta didik mampu beradaptasi dengan makna nilai, dipandang sebagai tindakan indoktrinasi yang dapat membelenggu daya kritis peserta didik terhadap makna nilai.

Pada sisi yang lain, muncul pertanyaan tentang keberhasilan dunia pendidikan, apabila mampu menjadikan peserta didik berfikir secara kritis mengenai nilai-nilai, tapi secara bersamaan peserta didik bersikap dan berperilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Begitu pula dalam hal nilai-nilai apa saja yang menjadi tanggung-jawab pendidikan dalam melakukan transformasi nilai pada peserta didik, karena pilihan nilai dunia pendidikan, bisa jadi bertentangan dengan pilihan nilai keluarga dan masyarakatnya.

Ketersediaan ruang dan waktu yang terbatas dalam proses pendidikan di sekolah, sering pula menjadi argumentasi guru dalam melepas tanggungjawab pendidikan karakter moral peserta didik. Pendidikan karakter moral, dipandang sebagai tanggungjawab keluarga dan komunitas agama melalui institusi-institusi keagamaan.

Menyikapi perdebatan tersebut, ada dua hal yang harus menjadi komitmen pendidikan. Pertama, nilai-nilai yang ditransformasikan adalah nilai-nilai yang memiliki tujuan dan manfaat secara universal, dapat diterima oleh masyarakat plural. Kedua, nilai-nilai universal tidak hanya diekspos dalam proses pembelajaran, melainkan dilakukan upaya membimbing peserta didik untuk mengerti, meresapi, dan bertindak berdasar nilai-nilai yang ditransformasikan.¹⁸

Sosial dan Politik Volume 13, Nomor 1, Juli 2009 (1-19) ISSN 1410-4946

18 Thomas Lickona, *Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, (New York : Bantam Books, 1991), 37-38

Kegelisahan atas fenomena tindak kekerasan yang diatasnamakan atau dipicu masalah perbedaan keyakinan atau paham keagamaan, tertuju atau diarahkan pada efektifitas pendidikan agama, karena didasarkan pada beberapa hal, antara lain : Pertama, pada dasarnya transformasi nilai perdamaian dapat dilakukan melalui pendidikan, lebih-lebih pendidikan agama, yang sejatinya memiliki muatan kurikulum nilai toleransi dan perdamaian, karena kedua nilai tersebut diajarkan dalam setiap agama. Hal ini dapat terjadi, apabila iklim pendidikan memungkinkan peserta didik dapat mengekspresikan potensinya secara bebas, kreatif dan mandiri melalui interaksi sosial yang inklusif.¹⁹ Peserta didik dalam iklim pendidikan tersebut, bisa menggunakan kapasitas kreatifnya, untuk melarikan diri dari perangkap kekerasan, ketidakadilan, bahkan peperangan.

Kedua, Pendidikan Islam, sebagai instrumen dalam pendewasaan manusia melalui pembumian ajaran Islam yang *rahmatan li al-'Alamin*, ikut memiliki tanggung jawab, dalam melakukan transformasi nilai kesadaran multikultural, sehingga *output* pendidikan Islam mampu hidup berdampingan dengan damai dalam pluralitas masyarakat. Namun demikian, dari penelitian Abdullah Aly di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta, ditemukan data yang menunjukkan adanya nilai-nilai multikultural dan sekaligus nilai-nilai anti-multikultural dalam penyusunan kurikulum. Abdullah Aly, menemukan fakta kontra produktif terhadap pengembangan multikulturalisme di Pesantren Assalam, yaitu pada *Adab al Ukhumwah al Islamiyyah*. Pada kurikulum pesantren tersebut, dengan jelas dinyatakan bahwa persaudaraan yang dimaksudkan adalah terbatas persaudaraan sesama umat Islam, untuk kalangan non-Islam tidak diperlukan persaudaraan, melainkan hanya dibutuhkan persatuan dan kasih sayang.²⁰ Dengan demikian, pengembangan nilai toleransi dalam temuan Abdullah Aly masih terbatas oleh sekat agama.

Ketiga, apabila mencermati fenomena yang terjadi dalam pendidikan Islam, baik di madrasah maupun di pesantren, dapat diasumsikan bahwa pengembangan nilai toleransi tampak masih ambigu. Secara konsepstual, nilai toleransi sebagai bagian dalam prinsip pengembangan masyarakat Islam, terumuskan dalam materi ajar, namun dalam penerapannya, seringkali terbelenggu oleh klaim kebenaran eksklusif doktrin paham keagamaan yang diikutinya. Ada hegemoni nilai, dalam sikap keberagaman yang berpengaruh terhadap proses pendidikan, sehingga menjadi tirani dalam pengembangan kesadaran toleransi.

19 M. Nurul Ikhsan Saleh, *Peace Education Kajian Sejarah, Konsep, dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), 49

20 Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren, Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta*, (Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 340..

Keempat, pendidikan pesantren walaupun dalam pemetaan pesantren, belum ditemukan suatu pengelompokan atau identifikasi pesantren berdasar paham keagamaan yang dianutnya, namun dengan mudah disaksikan bahwa pendidikan pesantren, dibangun di atas pondasi paham keagamaan tertentu. Kalau pada perkembangan awal, pesantren dengan paham keagamaan tertentu selalu mengedepankan sikap moderat, sehingga dinilai sebagai lembaga pendidikan Islam yang berwatak lentur, mudah beradaptasi dan bahkan dengan mudah mengakomodir budaya lokal, pada saat ini muncul beberapa pesantren yang berwatak sebaliknya, radikal, intoleran, bahkan diduga terkait dengan beberapa aksi kekerasan.

Perbedaan paham keagamaan, yang dikembangkan di masing-masing pesantren, apabila tidak diikuti pengembangan sikap keberagaman yang inklusif, transformasi kesadaran multikultural yang meniscayakan pluralitas, dan pengembangan sikap toleransi yang komprehensif, kondisi tersebut memungkinkan pada masa mendatang, terjadi benturan bukan antara dunia Islam dan dunia barat seperti dalam tesis Huntington, melainkan akan terjadi benturan yang semakin dahsyat dalam dunia Islam sendiri.

Pendidikan Islam, apabila mengalami kegagalan dalam menumbuhkan kesadaran pluralisme dan multikulturalisme pada peserta didik, maka outputnya tidak akan dapat mengembangkan nilai toleransi dan perdamaian dalam pluralitas agama dan paham keagamaan. Hal tersebut bisa terjadi, apabila : *Pertama*, pendidikan Islam lebih menekankan pada proses transfer ilmu agama, ketimbang proses transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral pada anak didik; *Kedua*, pendidikan Islam hanya sekedar dijadikan sebagai pelengkap, dari keseluruhan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan IPTEK. *Ketiga*, penanaman nilai-nilai moral, seperti azas persamaan dalam hidup, rasa cinta, kasih sayang, persaudaraan, saling menolong, cinta damai dan toleransi, kurang mendapat porsi dalam pendidikan Islam; *Keempat*, kurang ada perhatian untuk mempelajari agama-agama lain dan pluralitas paham keagamaan dalam Islam,²¹

Bertolak dari kegelisahan tersebut, maka penelitian pendidikan toleransi di pesantren memiliki urgensi, karena pesantren sebagai pioner lembaga pendidikan Islam di Indonesia, sejak awal pertumbuhannya, dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang lentur dan moderat. Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton diasumsikan dapat memenuhi kebutuhan data penelitian pendidikan toleransi di pesantren, karena pada naskah resmi pesantren tersebut (visi PP. Nurul Jadid) dengan tegas mencantumkan nilai toleransi.

21 Sumartana dkk. *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), 239-240.

Pesantren Nurul Jadid sebagai Pendidikan Plural

Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang didirikan pada 1948 oleh KH Zaini Mun'im, memiliki visi "Terbentuknya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak al-karimah, berilmu, berwawasan luas, berpandangan ke depan, cakap, terampil, mandiri, kreatif, memiliki etos kerja, toleran, bertanggung jawab kepada masyarakat, serta berguna bagi agama bangsa dan negara".²² Pada dasarnya, Pesantren sama dengan pesantren pada umumnya, dalam pengembangan nilai-nilai yang ditanamkan ke dalam jiwa santri; yaitu nilai-nilai yang digali dari ajaran Islam dan kearifan lokal yang bersifat universal.

Namun demikian, pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Nurul Jadid, sejak awal telah merumuskan ideologi pesantren sebagai acuan dalam pembinaan karakter santri dan pengembangan program pesantren, yaitu Trilogi Santri dan Panca Kesadaran Santri.

1. Trilogi Santri

- a. *Al-Ibtimâm bi al-Furûdb al-'Ainiyyah* (Berkomitmen dalam menjalankan kewajiban-kewajiban individu yang mendasar)
- b. *Al-Ibtimâm bi tarki al-Kabâir* (Berkomitmen dalam meninggalkan dosa-dosa besar)
- c. *Husnu al-adab ma'a Allabi wa ma'a al-kehalqi* (Berbudi luhur baik kepada Allah maupun kepada semua ciptaan Allah)

2. Panca Kesadaran Santri

- a. Kesadaran Beragama
- b. Kesadaran Berilmu
- c. Kesadaran Bermasyarakat
- d. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
- e. Kesadaran Berorganisasi.²³

Trilogi Santri merupakan fondasi dalam pengembangan kualitas keberagamaan santri, baik dalam kaitan dengan Allah maupun dalam kaitan dengan sesama manusia, bahkan dengan semua makhluk Allah. Penetapan *al-furûdbul 'ainiyyah dan tarki al-kabâir*, merupakan standart minimal, yang harus menjadi perhatian dan komitmen santri dalam menjalankan kewajiban agama, sehingga melalui komitmen tersebut, para santri diharapkan mampu terus menyempurnakan amaliah keagamaannya.²⁴

Panca Kesadaran Santri yang memposisikan kesadaran beragama, menempati posisi kesadaran pertama, menjadikan kesadaran beragama sebagai titik utama yang harus mendasari kehidupan santri agar seluruh

22 KH. Hefni Razaq dkk (Tim Penyusun), *Profil Pondok Pesantren Nurul Jadid*, (Probolinggo, Humas Sekretariat Pondok Pesantren Nurul Jadid, t.th), xviii,

23 *Ibid.*, xiv-xv. Lihat juga M. Rahwini Anwar, *Sejarah Almarhum KH. Zaini Mun'im dan Pondok Pesantren Nurul Jadid* (Paiton: Biro Umum, 1997), 34.

24 KH. Zuhri Zaini, *wawancara*, Paiton, 22 Januari 2015

aktifitasnya benar-benar diletakkan di atas rel kehidupan yang ditunjukkan Allah. Kesadaran ini, meliputi tiga aspek pokok dalam agama; yaitu aqidah, ibadah dan akhlaq, yang tiga aspek tersebut dibangun diatas tiga landasan pokok; yaitu wawasan keagamaan yang luas, tanggungjawab keagamaan yang tinggi, dan penghayatan keagamaan yang mendalam.²⁵

Kesadaran berilmu yang menjadi kesadaran kedua dalam Panca Kesadaran Santri, merupakan sikap dasar santri yang senantiasa menempatkan ilmu sebagai sesuatu yang urgen dalam kehidupannya, karena hidup tanpa ilmu akan tersesat. Dalam pembinaan kesadaran berilmu, yang menjadi titik tekan dalam pembinaan santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid, adalah kesadarn berilmu yang dijiwai oleh kesadaran beragama,. Karena itu penanaman ilmu, senantiasa dikaitkan dengan pembinaan amaliahnya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban pokok dalam agama, termasuk kewajiban dalam menyebarkan ajaran agama sebagai bentuk komitmen dalam meneruskan kerisalahan Nabi Muhammad Saw. Dengan demikian pula, maka santri Pondok Pesantren Nurul Jadid, tidak hanya diarahkan untuk menguasai ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang menunjang dalam penyebaran agama, baik ilmu-ilmu sosial maupun ilmu pengetahuan alam, dan teknologi.²⁶

Kesadaran bermasyarakat yang diposisikan sebagai kesadaran ketiga dalam Panca Kesadaran Santri, bertolak dari prinsip bahwa kehidupan bermasyarakat merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, karena sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia yang satu membutuhkan manusia yang lain. Melalui pembangunan kesadaran bermasyarakat ini, diharapkan pondok pesantren dan seluruh santrinya tidak menjadi menara gading yang jauh dari masyarakatnya, melainkan bisa menjadi menara air yang dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Pesantren dan santri harus menyatu dengan masyarakat, saling bergandeng tangan dalam pembangunan agama dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terwujud masyarakat yang religius dan tercerahkan dalam kehidupannya.²⁷

Kebijakan Pondok Pesantren Nurul Jadid sejak pengasuh pertama sampai sekarang, dalam memantapkan kesadaran bermasyarakat, mengharuskan setiap kegiatan yang dilaksanakan organisasi daerah santri atau forum alumni di masyarakat harus menggandeng organisasi masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Bahkan Kiai Zaini selalu menyatakan agar santri Nurul Jadid tidak bersikap eksklusif, tidak boleh membangun

25 KH. Hefni Razaq dkk (Tim Penyusun), *Profil Pondok Pesantren Nurul Jadid*, 24

26 *Ibid.*, 26-30.

27 *Ibid.*, 31-32.

fanatisme kelompok termasuk fanatik kepada Pondok Pesantren Nurul Jadid, sehingga kegiatan para santri melalui organisasi daerah, diarahkan pula tidak hanya menggandeng organisasi kemasyarakatan yang ada di daerahnya, tapi juga menggandeng santri dan alumni dari pesantren yang lain. Kebijakan Kiai Zaini sebagai pendiri dan pengasuh pertama tersebut terus dijadikan acuan sampai sekarang.²⁸

Kesadaran Berbangsa dan Bernegara yang diposisikan sebagai kesadaran keempat dalam Panca Kesadaran Santri, dimaksudkan bahwa santri harus memiliki pandangan, dan sikap atau wawasan, serta tanggungjawab dalam pembangunan bangsa dan negara, sebagai bagian dari tugas keagamaan. Sikap nasionalisme dan patriotisme, merupakan bagian penting dari jiwa kesantrian, sebagai bentuk tanggungjawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengalaman KH. Zaini Mun'im yang terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, tentu ikut menginspirasi dalam perumusan kesadaran berbangsa dan bernegara, karena itu pula beliau senantiasa menyampaikan bahwa santri Nurul Jadid harus menjadi muslim aktif, harus berjuang di masyarakat untuk agama, bangsa dan negara, sesuai dengan bakat dan keahlian serta profesinya masing-masing.²⁹

Kiai Zaini dalam pengembangan nilai kebangsaan, antara lain dengan mengembangkan sikap moderat dalam menghadapi realitas pluralitas ummat Islam dan bangsa Indonesia. Bagi Kiai Zaini perbedaan itu suatu keniscayaan, karena itu dalam pembangunan kehidupan berbangsa tidak perlu mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang ada, melainkan harus lebih diarahkan untuk mencari titik temu atau persamaan-persamaannya, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa semakin kokoh.³⁰

Kesadaran berorganisasi yang menempati pada posisi kesadaran kelima dalam Panca Kesadaran Santri, memiliki makna bahwa dalam pengelolaan segala sumber daya dalam pembangunan kualitas keberagamaan, pembangunan pendidikan, dan berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, harus ditata dengan baik, sehingga tercapai keberhasilan yang efektif dan efisien. Melalui kesadaran berorganisasi ini, diharapkan santri Nurul Jadid akan selalu mengedepankan kepentingan dan tujuan bersama dalam setiap derap langkahnya.³¹ Karena itu, dapat disaksikan dengan jelas, kehidupan organisasi di Pondok Pesantren Nurul Jadid, sangat bergairah dan mendapat dukungan secara kelembagaan, baik organisasi intra di semua tingkat lembaga pendidikan maupun organisasi ekstra.

28 KH. Zuhri Zaini, *wawancara*, Paiton, 22 Januari 2015

29 KH. Hefni Razaq dkk (Tim Penyusun), *Profil Pondok Pesantren*, 32-35.

30 M. Masyhur Amin, M Nasikh Ridwan, *KH. Zaini Mun'im, Pengabdian dan Karya Tulisnya*, (Yogyakarta: LKPSM, 1996), 73.

31 KH. Hefni Razaq dkk (Tim Penyusun), *Profil Pondok Pesantren*, 35-36.

Di samping nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi pesantren tersebut, berbagai nilai universal yang juga ditanamkan kepada santri antara lain : kesederhanaan, kemandirian, keadilan, persaudaraan, persamaan, persatuan, toleransi, moderat, demokrasi, dan amar ma'ruf nahi munkar.³²

Proses penanaman nilai-nilai dasar kepesantrenan tersebut, secara kognisi diawali dengan pengenalan nilai-nilai tersebut pada saat masa orientasi santri baru (OSABAR), yang dilanjutkan dengan pendalaman pengetahuan nilai-nilai tersebut, di masing-masing lembaga yang integral dalam berbagai mata pelajaran/mata kuliah, khususnya mata pelajaran aswaja dan mata kuliah kepesantrenan. Kekuatan utama dalam penanaman nilai tersebut, adalah ketauladan para pembina, baik jajaran pengasuh, pengurus, pembina asrama, dan para guru serta dosen. Kemudian dikokohkan melalui proses pembiasaan hidup santri di atas nilai-nilai dasar tersebut. Peneguhan nilai-nilai tersebut, kembali dilakukan secara terprogram, pada setiap santri mengakhiri masa studinya di masing-masing tingkatan, dengan diadakan program orientasi santri kelas akhir (Oskar), dengan harapan setelah para santri keluar dari pesantren Nurul Jadid, dimanapun berada tetap mempertahankan nilai-nilai dasar kepesantrenan.³³

Nilai-nilai yang dikembangkan dan ditanamkan pada santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid, selaras dengan kepribadian pendirinya – KH. Zaini Mun'im – yang dalam pembacaan M. Mashur Amin dan M. Nasikh Ridwan, Kiai Zaini memiliki sepuluh kepribadian utama; yaitu :

Pertama, Populis. Walaupun Kiai Zaini keturunan Kiai dan Bangsawan, dengan kondisi ekonomi yang ada di atas rata-rata, Kiai Zaini tampil sebagai sosok yang sederhana, dan bergaul dengan masyarakat umum tanpa membangun sekat antara dirinya dan orang lain, bahkan gelar kebangsawanan sebagai raden tidak pernah dilekatkan dengan namanya.³⁴

Kedua, Cinta Ilmu. Sebagaimana digambarkan di muka, bahwa beliau dapat dikategorikan santri kelana yang masa mudanya dihabiskan untuk menggali ilmu Allah dari pesantren ke pesantren, bahkan sampai ke tanah suci Mekah, Dalam diskripsi penelitian M. Masyhur Amin dan M. Nasikh Ridwan dikisahkan bahwa ketika beliau berguru pada Syekh Syarif Ahmad Bin Ghulam di Mekah, beliau tidak hanya menimba ilmu dari gurunya, tapi sekaligus menjadi pembantunya. Pada suatu ketika, di saat menimba air untuk mengisi bak air di kamar mandi gurunya, tiba-tiba timba yang digunakan menimba air dari sumur berisi emas. Beliau tidak mengambil emas tersebut bahkan memasukkan kembali emas tersebut ke dalam sumur. Alasan beliau

32 KH. Zuhri Zaini, *wawancara*, Paiton, 22 Januari 2015

33 *Ibid.*

34 M. Masyhur Amin, M. Nasikh Ridwan, *KH. Zaini Mun'im*, 32.

mengembalikan emas tersebut ke dalam sumur, karena yang beliau inginkan ilmunya bukan emasnya.³⁵

Ketiga, Jujur dan Ikhlas. Sejak Kiai Zaini masih muda saat mondok di Tebuireng, beliau mendapat julukan dari KH.Hasyim Asy'ari Zaini al-Khalis {i.³⁶ Pemberian julukan ini, tentu tidak lepas dari penilaian sang guru pada muridnya yang dinilai memiliki jiwa keikhlasan tinggi. Begitu pula pada saat Kiai Zaini berguru pada Syekh Syarif Ahmad bin Ghulam di Mekah, beliau sering diperintah oleh gurunya untuk melakukan sesuatu, yang bagi kebanyakan orang dapat menimbulkan rasa malu, seperti membuang kotoran binatang, mencari dan memikul rumput untuk pakan binatang, dan berbagai pekerjaan di rumah sang guru layaknya sebagai pembantu. Ini menunjukkan, bahwa penempatan jiwa keikhlasan, ketawadhuan dan berbagai akhlaq luhur telah ditempuh sejak masa muda di tangan guru-gurunya.³⁷

Keempat, Hidup sederhana. Kesederhanaan Kiai Zaini, tercermin dari pakaian yang digunakan sendiri maupun pakaian yang dibeli untuk putra putrinya dan keluarga yang lain. Beliau selalu berpakaian seperti layaknya masyarakat umum, sehingga keberadaan beliau di tengah-tengah kumpulan masyarakat, tidak mencolok bahkan banyak orang tidak menyangka kalau beliau adalah seorang Kiai.³⁸ Kesederhanaan Kiai Zaini, menjadi tauladan bagi putra-putrinya, dimana dari pengamatan peneliti selama berada di Pondok Pesantren Nurul Jadid, pola hidup putra-putrinya mencerminkan kehidupan yang sederhana, dari pakaian, tempat tinggal, dan kendaraannya.

Kelima, Memulyakan dan menghormati orang lain. Walau Kiai Zaini keturunan Bangsawan dan seorang Kiai yang diakui kedalaman ilmunya, beliau selalu merendah dan menghormati siapapun baik kepada masyarakat awam, anak-anak muda, lebih-lebih kepada orang yang dipandang memiliki kedalaman ilmu, dan orang-orang yang lebih tua, serta kepada para tamu beliau walaupun tamu itu wali santri.³⁹

Keenam, Sabar dan tabah. Kiai Zaini juga dikenal sebagai sosok yang sabar dalam menghadapi ujian yang menimpa dirinya, baik ketika beliau dipenjarakan oleh Belanda pada masa perang kemerdekaan – pada saat baru beberapa bulan menetap bersama beberapa orang santri di tanjung – maupun ketika tembakau barang dagangan beliau, disita oleh Polisi dengan tuduhan menimbun tembakau tanpa ijin usaha, beliau menghadapinya dengan kesabaran dan ketabahan.⁴⁰

35 *Ibid.*, 33-34.

36 *Ibid.*, 34

37 *Ibid.*

38 *Ibid.*, 35.

39 *Ibid.*, 35-36.

40 *Ibid.*, 36-37.

Ketujuh, Lentur. Dalam penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat, Kiai Zaini selalu menerapkan hukum sesuai dengan kondisi masyarakat. Walaupun beliau sendiri menerapkan hukum Islam yang ketat, namun ketika hukum tersebut berkaitan dengan masyarakat, penerapannya diarahkan pada hukum yang lebih longgar. Seperti dalam kasus bunga Bank, walaupun dirinya dengan tegas menyatakan haram dan tidak pernah berhubungan dengan pinjaman dana bank, namun ketika masyarakat yang menanyakan hukum tersebut, beliau menjawab bahwa hukum bunga bank ada tiga – sesuai keputusan NU – yaitu haram, mubah dan makruh.⁴¹

Kedelapan, Gigih dan Pemberani. Kiai Zaini dikenal sebagai pejuang yang gigih dan pemberani dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, apalagi dalam perjuangan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada tindakan ketidakadilan terhadap masyarakat, beliau turun tangan secara pribadi mendatangi pihak-pihak yang terkait untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, begitu pula ketika ada pihak-pihak yang berupaya menghalangi pelaksanaan kegiatan keagamaan, beliau mendatangi pihak yang menghalangi untuk meminta penjelasan, dan minta agar masyarakat diberi kebebasan dalam menjalankan agama dan kegiatan keagamaan.⁴²

Kesembilan, Bercita-cita tinggi dalam keilmuan. Kiai Zaini yang dikenal sebagai sosok yang mencintai ilmu, senantiasa mengarahkan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuannya terutama dalam ilmu keislaman.⁴³ Beliau gigih dalam penyebaran ilmu bukan hanya di pesantren, tapi juga di tengah-tengah masyarakat. Ketika beliau menjadi Rais Syuriah NU di PC NU Kraksaan pada tahun 1953, salah satu program beliau untuk membasmi kemungkaran dengan program *sullamisasi* (meratakan pengajian kitab *Sullam* di tengah-tengah masyarakat).⁴⁴ Para santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid, sejak masa kepemimpinan beliau sebagai pendiri dan pengasuh pertama, diwajibkan mengikuti pendidikan formal minimal lulus tingkat SLTA.⁴⁵

Kesepuluh, Demokratis dan terbuka. Dalam pengelolaan pesantren, Kiai Zaini sering menyampaikan prinsip dasar dipegangi dirinya bahwa, Pondok Pesantren Nurul Jadid didirikan untuk ummat Islam, dan bukan milik pribadi melainkan milik ummat Islam, karena itu siapapun yang akan memberikan masukan dan berpartisipasi, sepanjang tidak menyimpang dari prinsip agama dan tidak mengikat, akan diterima dan dipertimbangkan sebagai in-put dalam

41 *Ibid.*, 37.

42 *Ibid.*, 37-38.

43 *Ibid.*, 38.

44 *Ibid.*, 72.

45 Pada saat peneliti baru masuk Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai santri pada tahun 1975, Kiai Zaini marah kepada walisatri yang meminta izin anaknya untuk berhenti mondok untuk diikahkan pada saat anaknya baru duduk di kelas dua Aliyah.

pengembangan pesantren.

Salah satu sarana yang digunakan untuk menampung keterlibatan masyarakat, adalah rapat umum walisantri dan alumni yang dilaksanakan bersamaan dengan peringatan HARLAH pada setiap tahun. Dalam forum itulah, para peserta rapat bebas menyampaikan kritikan, pandangan, usulan dan pertimbangan dalam upaya pengembangan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Jadid.⁴⁶

Penutup

Dalam dinamika pendidikan pesantren, keterbukaan pesantren tidak hanya dalam menerima pengetahuan non-keagamaan, sistem pendidikan klasikal, dan kehadiran teknologi informatika, bahkan terbuka dalam manajemen SDM. Penerimaan tenaga pendidik lebih mempertimbangkan kapasitas dan integritasnya, tidak mempertimbangkan latar belakang agama dan paham keagamaannya, sehingga pendidik di pesantren menjadi heterogen.

Keterbukaan pesantren juga diwujudkan dalam penerimaan peserta didik yang tidak mempertimbangkan latar belakang agama dan paham keagamaannya, begitu pula dalam menentukan mitra kerjasama pengembangan pesantren di semua bidang, tidak mempertimbangkan latar belakang agama dan paham keagamaannya pula. Sikap dan tindakan manajemen pesantren yang terbuka, menjadi kekuatan atau pilar dalam pendidikan toleransi di pesantren.

Di Pesantren Nurul Jadid, pendidikan toleransinya memiliki landasan paradigmatis yang kuat, yaitu paradigma Panca Kesadaran dan Trilogi Santri yang berimplikasi pada pandangan yang holistik dalam melihat agama, bangsa, dan negara. Dengan paradigma tersebut, maka pengembangan nilai toleransi dalam pendidikan pesantren akan dapat dikendalikan untuk tidak terjebak pada liberalisasi agama atau sinkretisasi agama.

46 M. Masyhur Amin, M. Nasikh Ridwan, *KH. Zaini Mun'im*....., 39.

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, A. (2011). *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren, Telaah Terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Amin, M.M., & Ridwan, N. (1996). *KH. Zaini Mun'im, Pengabdian dan Karya Tulisnya*. Yogyakarta: LKPSM.
- Anwar, M. R. (1997). *Sejarah Almarhum KH. Zaini Mun'im dan Pondok Pesantren Nurul Jadid*. Paiton: Biro Umum.
- Elmirzana, S. (2001). "Pluralisme, Konflik, dan Dialog: Analisa dan Refleksi", *Esensia*, 2. (Januari).
- Engineer, A. A. (2000). "On Religious and Intercultural Dialogue," <http://www.global.net.com>.
- Hanafi, H. (2000). *Islam in The Modern World: Tradition, Revolution and Culture Vol.II*. Kairo: Dar Keba Bookshop.
- Harahap, S. (2011). *Teologi Kerukunan*. Jakarta: Prenada
- Hidayat, H. (1999). "Agama-agama Besar Dunia: Masalah Perkembangan dan Interelasi," Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (eds.). *Passing Over Melintasi Batas Agama*. Jakarta: Gramedia.
- Hisyam, M. (2006). *Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Rawan Konflik*. Jakarta: LIPI.
- <http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/06/ri-becomes-more-intoleransi-html>, Diakses pada 14 Juni 2013.
- KH. Zuhri Zaini, *wawancara*, Paiton, 22 Januari 2015
- Kuntowijoyo. (1998). *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Kusumadewei, L. R. (1999). "Sikap dan Toleransi Beragama di Kalangan Mahasiswa; Studi di Tiga Perguruan Tinggi di Jakarta," *Skripsi*. Jakarta: FISIP-UI.
- Lay, C. (2009). "Kekerasan atas Nama Agama, Perspektif Politik," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 13, Nomor 1, Juli. ISSN: 1410-4946.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Maksum, A. (2011). *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam Indonesia*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Mujani, S. (2004). *Umat Islam Indonesia Dukung Radikalisme*. Jakarta: Harian Tempo.
- Raharjo, M. D. (2011). "Fanatisme dan Toleransi," dalam Irwan Masduki, *Berislam Secara Toleran Teologi Kerukunan Umat Beragama*. Bandung : Mizan.

- Razaq, H., dkk. (t.t.). *Profil Pondok Pesantren Nurul Jadid*. Probolinggo: Humas Sekretariat Pondok Pesantren Nurul Jadid.
- Saleh, N. I. (2012). *Peace Education Kajian Sejarah, Konsep, dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Shihab, A. (1997). *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Sumartana, dkk. (2001). *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Penyusun. (2008). *Toleransi dalam Pasungan : Pandangan Generasi Muda terhadap Masalah Kebangsaan, Pluralitas dan Kepemimpinan Nasional*. Jakarta: SETARA Institute.
- Ujan, A. A., dkk. (2011). *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta : PT. Indeks.
- Yamin, M., & Auliya, V. (2011). *Meretas Pendidikan Toleransi, Plurasisme dan Multikulturalisme Keniscayaan Peradaban*. Malang: Madani Media.

Author Guidelines

Papers submitted for publication must conform to the following guidelines:

- Papers should discuss Islamic studies, written either in Indonesia, English, or Arabic;
- Papers must be typed in one-half spaced on A4-paper size;
- Papers' length is about 6,000-10,000 words;
- All submission must include a 150-200 word abstract;
- Full name(s) of the author(s) must be stated, along with his/her/their institution and complete address;
- All submission should be in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format;
- Arabic words should be transliterated according to the style of at-turās̄;
- Bibliographical reference must be noted in footnote and bibliography according to at-turās̄ style.
- When a source is cited for the first time, full information is provided: full name(s) of author(s), title of the source in italic, place of publication, publishing company, date of publication, and the precise page that is cited. For the following citations of the same source, list the author's last name, two or three words of the title, and the specific page number(s). The word *ibid.* may be used, but *op.cit.*, and *loc.cit.* are not.
- Examples of footnote style:
 - ¹ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar ibn Al-khattab: Studi tentang Perubahan Hukum tentang Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers,1991), 121-122.
 - ² *Ibid.*, 20.
 - ³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, vol. II, 2nd edition, 1985), 3.
 - ⁴ *Ibid.*, 5.
 - ⁵ Nuruddin, *Ijtihad*, 50.
- Example of Bibliography:
 1. Khalid, A., & Wahyudi, A. (1985). *Kisah Walisongo Para Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa*. Surabaya: Karya Ilmu
 2. Zulkifli. (1994). "Sufism in Java: The Role of the Pesantren in the Maintenance of Sufism in Java," *Master Thesis*. Singapore: Australian National University.
 3. Nur, I. M. (2001). "Differing Responses to an Ahmadi Translation and Exegesis: The Holy Qur'an in Egypt and Indonesia," *Journal of Archipel*, 62(1), 143-161.

Please consider the following criteria:

- The title of the article submitted to at-turāš should reflect a specific focus of study, based on researches--be they library or fieldwork researches--and thus the author can have a general statement and sub-title specifically confining the scope of study
- The article submitted should be based on research--be it library or fieldwork or other kinds of researches
- The article should present bibliography which entails primary sources--books, manuscripts, interviews, or observation--and updated secondary sources from books or peer reviewed journals
- The article should contain an argument/thesis/finding which contribute to scholarly discussion in a field of study which should clearly be mentioned and systematically presented in abstract, content, and conclusion
- The article should use good Indonesia, English, Arabic, or at least can be understood; the author is fully responsible in fixing and editing them; the copy editor of at-turāš is responsible only for minor typos and understandable grammatical errors
- The style and format, including the structure of article, footnotes, bibliography, should follow those of at-turāš.

NOTE: It is suggested the use of a reference manager at styling the footnote and the bibliography, such as Zotero, Mendeley, and so forth with following standard of *American Psychological Association* (APA) style.

The PDF version of this guideline and the Arabic transliteration guideline used International Journal of Middle Eastern Studies. For detailed transliteration could be seen at <http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf>

Copyright Notice

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

Privacy Statement

- The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.